

AJARAN MORAL IMMANUEL KANT; JALAN MENUJU KEBAHAGIAAN

Adnan Mahmud
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ternate
Jl Dufa-dufa Pantai Ternate Maluku Utara
e-mail: el.adnan75@gmail.com

Abstract

Human beings have an awareness of what should become his own responsibilities and obligations. Morally, someone should be able to determine for himself what must be and will be doing and at the same time he can't throw or relinquish that responsibility to others. Inner voice makes someone aware that humans always reserves the right to determine and take every attitude and actions themselves, and the obligation to always obey on various authorities in public life has always been limited, and therefore the whisper command to fight against the voice of conscience from wherever the advent it becomes a mandatory to be rejected because it contradicts to morals, because the voice of conscience is the voice of God. The moral should contain an objective form of unconditional kindness and without qualification. The purpose of human beings as individuals is to achieve happiness, and the happiness is the most important and essential to be found, namely a life to come, the life becomes a dream of all people.

Keywords: moral, awareness, responsibility, and the inner voice

A. Pendahuluan

Manusia pada dasarnya tumbuh dalam dunia yang telah memiliki pertimbangan moral. Pertimbangan ini sesungguhnya dilalui setiap hari oleh setiap manusia dengan memperhatikan perilaku kehidupan setiap orang. Manusia tidak hanya menemukan dirinya sendiri untuk menyetujui atau menolak bagaimana orang lain dalam bertindak, akan tetapi menyetujui atau menolak tindakan tertentu dan bahkan aturan atau prinsip dalam bertindak adalah lepas dari perasaannya tentang seseorang yang melakukan atau yang mengikuti mereka. Sehingga kebanyakan manusia menerapkan pertimbangan

tertentu untuk menerima atau menolak perilaku seseorang sejauh pertimbangan tersebut sesuai dengan standar atau prinsip yang berlaku.

Standar moral pribadi seseorang mungkin tidak akan persis sama dalam semua aspek dengan standar moral yang dimiliki oleh orang lain atau sesama atau sebangsa dengan kita, akan tetapi standar tersebut memiliki kemiripan. Kita akan menemukan perbedaan standar yang lebih besar ketika akan membandingkan antara standar yang kita miliki dengan standar negara lain dan tidak menutup kemungkinan perbedaan akan lebih besar lagi ketika membandingkannya dengan standar moral bangsa di masa lalu.¹ Dengan mempertimbangan seberapa besar kewajiban kita terhadap orang lain, opini individu yang berbeda-beda mengandung perbedaan yang cukup besar.

Setiap individu akan berpikir bahwa satu-satunya kewajiban individu bukan untuk durhaka terhadap orang lain atau kewajiban untuk membantu orang lain secara praktis adalah tanpa batas. Masih ada orang yang berpendapat bahwa orang yang memerlukan bantuan atau menderita harus dibantu, akan tetapi tidak mengurangi insentifnya untuk membantu dirinya sendiri atau mengurangi insentif untuk menghasilkan usaha dari orang yang meminta bantuan.² Sehingga tidak ada batas yang pasti untuk dapat ditarik dan tidak ada aturan yang pasti untuk disusun terkait dengan seberapa besar kewajiban kita terhadap orang lain. Sebab dalam kewajiban tersebut, senantiasa terdapat zona yang samar-samar.³

¹ Henry Hazlitt, *Dasar-dasar Morallitas*, (terj.), cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 9

² Henry Hazlitt, *Dasar-dasar Morallitas.*, h. 137

Masyarakat kapitalis cenderung menjadikan kekuasaan maupun konsumsi sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai, maka tidak mengherankan bahwa apa yang dijanjikan oleh kapitalisme tersebut untuk diberikan kepada warga masyarakat modern yang dalam realitasnya tidak pernah menjadi kenyataan. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kapitalisme dengan kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya telah berhasil menjinakan kekuasaan yang pada masa sebelumnya dikaitkan dengan alam, akan tetapi kekuasaan alam yang sebelumnya tidak terkendali, dapat mengokohkan dirinya kembali dalam dataran sejarah masa kini. Manusia modern tidak mempunyai kekuasaan kolektif untuk mengendalikan jalannya sejarah.⁴ Dalam masyarakat modern, persahabatan adalah gejala yang bersifat temporal. Persahabatan dapat disingkirkan oleh nilai-nilai dan moralitas kehidupan publik yang menjadi urusan besar, dan di dalam dunia privat, kehidupan personal sebagian besar didominasi oleh tuntutan dan hubungan yang lebih intim, khususnya hubungan yang dibentuk oleh keluarga.⁵ Artinya bahwa, aspek moral sebagai alat ukur untuk menilai layak tidaknya seseorang yang dapat dijadikan sebagai *partner* dan jangan karena demi mempertahankan "gengsi" atau "martabat keluarga" aspek moralitas yang merupakan nilai-nilai fundamental harus dikorbankan.

Harapan dan keinginan kapitalisme untuk menggenggam kekuasaan sekaligus memuaskan keinginan warga masyarakat,

³ Henry Hazlitt, *Dasar-dasar Morallitas.*, h. 137

⁴ Rosa Poole, *Morallitas dan Modernitas* (terj.), cet. ke-1, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. xiii

⁵ Rosa Poole, *Morallitas dan Modernitas*, h. 71

ternyata tidak terpenuhi bahkan jauh dari harapan bahkan justru melahirkan ketegangan dan frustrasi. Pertanyaannya kemudian adalah, dimanakah posisi moralitas dalam pandangan Immanuel Kant? Benarkah moralitas sebagai alternatif dalam memecahkan problem kemanusiaan yang dialami manusia modern saat ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dielaborasi dalam tulisan ini.

B. Moral: Jalan Menuju Tuhan

Modernitas dengan segala konsekuensinya telah mempraktekkan sebuah konsep mengenai alasan untuk bertindak. Konsep ini memiliki konsekuensi logis bahwa perintah-perintah moralitas kurang memperdulikan motivasi yang diarahkan. Karena itu, modernitas dengan segala konsekuensi pengetahuan dan teknologinya berusaha menyingkirkan pengetahuan tentang moral. Moralitas, bagi modernitas bukan menjadi persoalan keyakinan yang rasional, akan tetapi hanya opini subjektif belaka. Di dunia yang menentang iman dan dogma, moralitas hanya dapat bertahan sebagai iman yang bersifat sangat pribadi atau keyakinan yang bersifat dogmatis, sehingga moralitas tidak dapat mempertahankan otoritasnya untuk memainkan perannya di dalam kehidupan sosial dan individu.

Adalah menjadi sebuah tuntutan, harapan, cita-cita dan keinginan masyarakat modern dimana setiap individu-individu bebas dan mampu menunaikan kewajibannya, yaitu dengan cara mengakui hak milik orang lain dan sekaligus menepati janjinya ketika ikatan kontrak dengan mereka telah disepakati. Pribadi-pribadi tersebut seharusnya bebas dari seluruh ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan mereka, dengan demikian mereka memiliki kebebasan untuk bertindak sebagaimana yang menjadi

tuntuta moralitas.⁶ Karena itu, bagi Immanuel Kant,⁷ moralitas adalah terkait dengan kewajiban, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu-individu apa pun dorongan dan kepentingan bagi dirinya. Dengan demikian, moralitas memerlukan individu-individu yang bebas.⁸ Kebebasan sangat terkait dengan rasionalitas yaitu dengan mengakui dan tunduk di bawah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara universal. Menjadi rasional apabila bertindak menurut prinsip-prinsip yang oleh Immanuel Kant disebut dengan "maksim-maksim",⁹ yang dikenakan tidak hanya kepada diri sendiri, akan tetapi kepada

⁶ Rosa Poole, *Morallitas dan Modernitas*, h. 24

⁷ Immanuel Kant dilahirkan pada tanggal 22 April 1724 di Kota Konigs berg, ibu kota Prussia Timur, Jerman dan meninggal pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 1804. Orang tuanya adalah penganut setia gerakan Pietisme, yaitu sebuah gerakan keagamaan dalam Protestantisme Jerman abad ke-18. Gerakan ini sangat menekankan pada kesalehan hidup sehari-hari, sikap batin yang baik dan Morallitas yang keras. Pokok ajarannya adalah hubungan pribadi atau individu dengan Tuhan melalui pembacaan Kitab Suci dan pengkudusan hidup melalui pelaksanaan kewajiban. Seorang penganut Pietisme diharapkan menyangkal dan mampu mengontrol dirinya dengan cara mengekang hawa nafsunya dan segala kecenderungan yang tidak teratur yang dapat menodai nilai kekudusannya. Bagi Pietisme, gereja sejati tidak berada di dalam organisasi mana pun atau dalam ajaran-ajaran teologi, melainkan di dalam hati orang yang percaya dan saleh. Kant melalui pendidikan formalnya di Collegium Fridericianum, sebuah sekolah yang berlandaskan pada semangat Pietisme. Mulai tahun 1740, Kant belajar filsafat, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan karena terdorong oleh rasa ingin tahu yang begitu besar dalam dirinya, Kant pun mempelajari teologi. Pada tahun 1755, Kant memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul *Meditationum Quarundum Deigne Succinta Delineatio* (Uraian Singkat atas Sejumlah Pemikiran tentang Api). Untuk lebih jelas lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 278-279

⁸ Rosa Poole, *Morallitas dan Modernitas*, h. 24-25

setiap pelaku di dalam situasi yang sama. Prinsip dasarnya dari moralitas adalah bertindak hanya menurut maksim dan pada saat yang sama menghendaki agar maksim tersebut menjadi sebuah hukum yang bersifat universal.¹⁰

Karena itu, bagi Kant¹¹ universalitas merupakan forma (*form*) dari hukum. Dengan demikian, hukum tentang apa pun seharusnya memiliki forma yang universal, jika dia tidak universal, maka dia sama sekali bukan hukum. Hukum-hukum kemerdekaan dan hukum-hukum alam, sekalipun memiliki perbedaan yang fundamental sama-sama memiliki forma umum yang universal. Dengan demikian, universalitas merupakan ciri esensi hukum.

Sebelum Immanuel Kant, asal usul moralitas sebenarnya sudah ada, seperti dalam tatanan alam spinoza atau dalam hukum kodratnya Thomas Aquinas. Sehingga bagi Kant, sumber moralitas tidak lain adalah kebebasan.¹² Akan tetapi, sebelum

⁹ Maksim adalah perbuatan subjektif, yaitu sikap dasar dari hati seseorang dalam mengambil sikap dan tindakannya secara konkrit. Jadi, maksim pada dasarnya adalah sikap dasar yang memberikan arah bersama kepada sejumlah maksud dan tindakan konkrit dan harus dibedakan dari prinsip objektif, yaitu berupa hukum praktis. Misalnya orang yang berniat untuk selalu memperhatikan perasaan orang lain atau selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri dengan cara mengorbankan orang lain. Maksim itu memperoleh kebaikan dan keburukan sekaligus. Untuk lebih jelas lihat Immanuel Kant, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, (terj.), cet. ke-1, (Jogjakarta: Inshigh Reference, 2004), h. 63. Lihat juga Franz Magnis – Suseno, *13 Tokoh Etika*, cet. ke-7, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 147

¹⁰ Franz Magnis – Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 25

¹¹ M. Amin Abdullah, *Antara Al-Gazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 2002), h. 77

¹² Franz Magnis – Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 140

memahami pemikiran Immanuel Kant tentang moral lebih jauh kita harus terlebih dahulu mengetahui metode dalam memperoleh pengetahuan yang dipakai oleh Kant, yaitu tentang *apriori*,¹³ yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa menggunakan data-data yang ada sebelumnya. Atau dengan lain ungkapan, metode Kant adalah murni deduktif tanpa memperhatikan unsur-unsur pengalaman atau empiris. Karena itu, bagi Kant prinsip-prinsip moralitas tidak tergantung kepada pengalaman sama sekali,¹⁴ akan tetapi berasal dari akal budi, yaitu kemampuan untuk mengatasi medan pancaindera berupa medan alam.¹⁵

Bersamaan dengan pemahaman inderawi, akal budi (*verstand*) mulai bekerja secara spontan untuk mengolah informasi (*input*) yang diberikan dari pengalaman pada tahap sebelumnya. Dengan menerapkan apa yang oleh Kant disebut sebagai kategori-kategori,¹⁶ yaitu konsep-konsep fundamental atau pengertian pokok yang dapat membantu seseorang dalam menyusun ilmu pengetahuan.¹⁷ Bagi Kant, setiap orang harus mengakui bahwa, hukum jika ingin dipertahankan secara moral yaitu sebagai dasar kewajiban dan harus mengisyaratkan

13¹³ Apriori merupakan pengetahuan yang menjadi ciri khas filsafat Immanuel Kant. Bagi Kant, pengetahuan apriori adalah pengetahuan yang tingkat kesahihannya tidak tergantung secara logis kepada pengalaman sebagai bidang pengetahuan yang sah secara objektif dan universal. Karena itu menurut Kant, nilai pengetahuan apriori terbatas pada bidang pengalaman yang mungkin ada. Inilah dilihat oleh Kant sebagai syarat kemungkinan terjadinya pengalaman. Padanan dari apriori adalah aposteriori, yaitu pengetahuan yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Untuk lebih jelas lihat Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), h. 69-70

14¹⁴ Franz Magnis - Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 141-142, lihat juga Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 283

15¹⁵ Franz Magnis - Suseno, *13 Tokoh Etika, Op. cit.*, h. 142

kebutuhan yang absolut, maka ia harus mengakui bahwa dasar kewajiban adalah tidak harus dicari dalam alam manusia atau dalam situasi dimana ia ditempatkan, akan tetapi semata-mata *a priori* dalam konsep akal murni dan setiap ajaran yang terletak pada prinsip-prinsip pengalaman berlaku bahkan ajaran yang dalam respek tertentu bersifat universal, selama bersandar pada dasar-dasar empiris dapat disebut sebagai aturan praktis (*practical rule*) dan bukan hukum moral (*moral rule*).¹⁸

Bagi Kant, moralitas sangat terkait erat dengan persoalan baik dan buruk. Walaupun dalam berbagai aspek tanpa ada pembatasan dalam arti kehendak baik. Sejauh seseorang berkehendak baik, ia baik tanpa ada pembatasan. Kehendak baik itu selalu baik dan dalam kebaikannya tidak tergantung pada sesuatu di luar dirinya.¹⁹ Sehingga untuk mengukur moralitas seseorang, kita tidak boleh melihat pada hasil perbuatannya. Hasil perbuatan itu baik tidaklah membuktikan adanya kehendak yang baik pula. Karena itu, Immanuel Kant menolak apa yang diistilahkannya dengan etika sukses. Sebab yang menjadikan

16¹⁶ Kategori-kategori Immanuel Kant terungkap dalam kumpulan ungkapan yang lengkap tentang pengelompokan putusan-putusan secara logis. Ada tiga kategori yang masing-masing terdiri atas empat bagian, yaitu: 1) Kuantitas terdiri dari universal, partikular dan singular. 2) Kualitas terdiri dari afirmatif, negatif, dan tak terhingga. 3) Relasi terdiri atas kategori, hipotetis, dan disjungtif. 4) Modalitas terdiri atas problematis, assertoris, dan apodeiktis. Jadi semuanya ada dua belas kategori yang merupakan materi pokok dari apa yang oleh Kant disebut sebagai *logika transendental* atau akal budi. Lihat Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, h. 396

17¹⁷ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 284

18¹⁸ Immanuel Kant, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, h. 5

19¹⁹ Franz Magnis – Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 143

perbuatan manusia itu menjadi baik dalam arti moral bukanlah hasil dari perbuatan tersebut, akan tetapi apakah kehendak pelaku dalam melakukan perbuatannya adalah semata-mata ditentukan oleh kenyataan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kewajiban.²⁰

Moralitas akan menentukan hak-hak dan kewajiban yang dianut di antara pemilik barang dan para pembuat kontrak. Komponen dasarnya adalah pada prinsip keadilan formal yang akan menuntut pengakuan timbal balik atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Moralitas akan mengabstraksikan hubungan-hubungan personal yang di dalamnya seseorang dapat bertahan hidup dan dari emosi yang mereka rasakan satu sama lainnya. Maka moralitas sebagai prasyarat adanya keadilan akan tampil sebagai suatu kewajiban yang menuntut bahwa pembatasan-pembatasan tersebut harus diindahkan.²¹

Kewajiban adalah keharusan tindakan karena rasa hormat terhadap hukum.²² Hukum yang semata-mata bersifat lahiriah yang pada dasarnya belum dapat memberikan kewajiban apabila hukum tersebut tidak membangkitkan "rasa hormat" dalam diri

²⁰ Franz Magnis - Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 144-145

²¹ Rosa Poole, *Moralitas dan Modernitas*, h. 68

²² Kant menggunakan kata "hukum" untuk menunjukkan kepada prinsip objektivitas dan rasionalitas bagi tindakan yang harus dilaksanakan, terlepas dari perasaan suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok dengan pandangan masyarakat. Contohnya; hukum yang menyebutkan bahwa "saat lampu lalu lintas menyala merah, kita harus berhenti", mewajibkan kita untuk bertindak demikian terlepas dari apakah kita senang atau tidak senang. Oleh karena itu, hukum di sini menunjukkan daya ikatnya yang berlaku secara umum, bukan sifat lahiriahnya yang dimiliki. Untuk lebih jelas lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 288

kita untuk menaatinya, maka hukum yang membangkitkan "rasa hormat" dapat kita sebut sebagai kewajiban.²³ Karena itu, bagi Kant,²⁴ kita perlu membedakan antara tindakan yang sesuai dengan kewajiban dan tindakan demi kewajiban. *Pertama*; tindakan yang sesuai dengan kewajiban adalah tindakan yang dilakukan bukan karena kecenderungan langsung, akan tetapi untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu yang baik atau menguntungkan.²⁵ *Kedua*; tindakan demiki kewajiban. Tindakan ini mengesampingkan unsur-unsur subjektifitas seperti kepentingan diri sendiri, pertimbangan untung-rugi dan berbagai kecenderungan lainnya, seperti senang dan enak. Dengan lain ungkapan tindakan tersebut berpedoman pada kaidah objektif yang menuntut ketaatan kita, yaitu berupa hukum yang diberikan oleh rasio melalui batin. Dengan demikian, kita memiliki kewajiban untuk tidak bunuh diri, tetapi kita juga mempunyai kecenderungan untuk tidak bunuh diri.²⁶ Kewajiban itulah sesungguhnya memberikan nilai moral kepada sikap, perilaku dan tindakan seseorang.

²³ Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 288

²⁴ Terkait dengan pandangan Kant tentang kewajiban dan tindakan, untuk lebih jelas lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 288-289

²⁵ Contohnya seperti tindakan seorang pedagang yang tidak ingin menipu pembeli adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban untuk bersikap baik dan jujur, akan tetapi kenyataan seperti ini belum menunjukkan apa-apa tentang nilai moral dari tindakan tersebut, sebab bisa jadi pedagang tersebut berbuat demikian agar dagangannya laris atau si pembeli tersebut kemungkinan besar merupakan pelanggan tetapnya. Dengan demikian, tindakan perdagangan tersebut tidak memiliki nilai moral dan itu berarti bahwa tindakan tersebut juga secara moral tidak baik dan tidak buruk. Lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 288-289

Karena itu, bagi Kant, ada dua hal yang harus mendapatkan perhatian serius, yaitu, *pertama*; karena moralitas bersumber pada tekad batin seseorang untuk melaksanakan kewajiban, maka secara moral pula kita tidak dapat menilai orang lain secara pasti. Yang dapat dilihat hanyalah apa yang tampak secara lahiriah, yaitu dalam bentuk perbuatan atau tindakannya dalam realitas kehidupan.²⁷ Akan tetapi, seseorang tidak dapat mengetahui dengan pasti maksud dan tujuannya yang sesungguhnya lahir dari tindakan atau perbuatan tersebut. Dengan demikian, dalam tindakan ada kemungkinan seseorang sanggup memberikan penilaian secara moral yang mutlak terhadap orang lain. Penilai moral seperti ini cenderung memperlihatkan kemunafikan pembicaraanya dibandingkan dengan kebenaran perkataannya. *Kedua*; adalah perbuatan antara "perbuatan yang sesuai dengan kewajiban" dan "perbuatan yang dijalankan demi kewajiban". Hal ini berimplikasi terhadap perbedaan dalam sebuah kekuatan atau daya ikat dari suatu kewajiban. Sebab dalam pandangan Kant, dalam kewajiban

²⁶ Immanuel Kant memberikan sebuah ilustrasi bahwa, seandainya pada suatu saat kita memiliki kecenderungan untuk melakukan bunuh diri, misalnya kecewa atau mengalami kesengsaraan atau kegagalan serta penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya, dan dengan cara bunuh diri seseorang terlepas dari semua perasaan tersebut, namun kita tidak melakukannya demi kewajiban untuk hidup, maka sikap seperti ini mempunyai nilai moral. Lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 289

²⁷ Kant kemudian memberikan contoh bahwa si fulan mencuri atau bekerja sebagai pelacur. Seseorang tidak dapat mengetahui secara jelas dan pasti tentang maksud dan tujuan perbuatan tersebut, akan tetapi yang ditangkap sesungguhnya hanyalah yang bersifat lahiriah semata. Karena itu, bagi Immanuel Kant, "Hanya Tuhan-lah yang dapat melihat dan menilai bahwa, tekad dan niat batin seseorang adalah moralitas yang dimilikinya, tulus, dan murni atau tidak. Lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 289

kita diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan apakah secara hipotetis atau secara kategoris. Maka bagi Kant, ada dua macam imperatif bagi sebuah tindakan, yaitu imperatif hipotetis²⁸ dan imperatif kategoris.²⁹ Karena itu, menurut Kant, nilai mutlak satu-satunya yang dimiliki manusia adalah kehendak baik secara moral. Kehendak baik tersebut mengikat dirinya pada hukum moral tanpa ada paksaan dan tekanan sekaligus.³⁰

Dengan demikian, bagi Kant, etika adalah sesuatu yang fitri,³¹ walaupun sumbernya tidak bersifat rasional ataupun teoritis. Bahkan immanuel Kant menjelaskan bahwa, etika bukanlah urusan "nalar murni",³² akan tetapi, etika adalah urusan "nalar praktis". Sebab pada dasarnya, nilai-nilai moral itu telah

²⁸ Imperatif hipotetis adalah perintah bersyarat yang dalam mengatakan suatu tindakan diperlukan sebagai sarana atau sebagai syarat untuk mencapai sesuatu. Contoh; jika seseorang memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai sepuluh dalam ujian bahasa Jerman, maka diperlukan kegigihan dan kesungguhannya dalam belajar. Perintah ini memberikan tindakan baik dalam arti memotivasi untuk belajar sebagai bagian dari sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh nilai sepuluh dalam ujian bahasa Jerman. Untuk lebih jelas lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 289-290. Lihat juga Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, h. 332

²⁹ Imperatif kategoris adalah perintah mutlak dan berlaku secara umum, yaitu keharusan yang tidak bersyarat, sebuah keharusan yang berlaku tanpa pengecualian sebab bersifat mutlak sehingga sifatnya universal. Imperatif kategoris ini tidak berhubungan dengan suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Sehingga bagi Immanuel Kant, tidak mungkin rasio dapat mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dengan demikian, perintah "kamu wajib terbang" misalnya, adalah bukan merupakan perintah moral-rasional yang berisi kewajiban di dalamnya, sebab kita tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa terbang. Lihat Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 331

³⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, h. 331

tertanam dalam diri manusia sebagai sebuah kewajiban (*imperatif kategoris*).³³ Sehingga untuk membuktikan kenyataan moralitas menurut Kant, tidaklah harus bersifat teoritis, akan tetapi harus bersifat praktis. Sebab etika bukanlah sesuatu yang abstrak, akan tetapi refleksi terhadap suatu tindakan dari pengalaman yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya oleh karena kesadaran moral itu sendiri.³⁴ Kesadaran adalah suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri, akan tetapi bukan sebagai fakta empiris, sebab fakta empiris harus dapat dibuktikan dan

31³¹ Islam juga berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri tersebut, sebab manusia pada hakikatnya memiliki pengetahuan yang fitri tentang baik dan buruk dan itu adalah sifat dasar manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Di sinilah sesungguhnya bertemunya Islam dengan pemikiran para filosof, terutama Immanuel Kant. Seperti dalam al-Quran Surat al-Syams (91): 8-10 disebutkan "*Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*" Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad saw. mengajarkan agar untuk mengetahui baik- buruknya sebuah perbuatan, kita harus menanyakan kepada hati- nurani (*qalb*). Dalam hadis yang lain Nabi Muahmmad saw. Juga menyatakan bahwa *perbuatan baik adalah yang membuat hatimu tenang, sedangkan perbuatan buruk adalah yang membuat hatimu gelisah.* Untuk lebih jelas lihat M. Amin Abdullah, *Antara Al-Gazali dan Kant*, h. 19

32³² Immanuel Kant membagi nalar menjadi 2, yaitu nalar teoritis dan nalar praktis. Nalar teoritis adalah yang terkait dengan pengertian sedangkan nalar praktis adalah terkait dengan tindakan. Untuk lebih jelas pembahasan tentang nalar teoritis dan nalar praktis lihat Frans Magniz - Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 142. Lihat juga M. Amin Abdullah, *Antara Al-Gazali dan Kant*, h. 17

33³³ M. Amin Abdullah, *Antara Al-Gazali dan Kant*, h. 17

34³⁴ Frans Magniz - Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 152

lepas dari kesadaran kita dan fakta moral hanya ada dalam kesadaran kita.³⁵

Dengan demikian, kebebasan berkehendak merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh karena berimplikasi secara langsung dalam kesadaran moral, yang oleh Kant disebut dengan istilah postulat.³⁶ Realitas menunjukkan bahwa kesadaran moralitas sesungguhnya berimplikasi pada kehendak yang benar-benar bebas. Artinya bahwa seseorang dapat mengambil sikap dan tindakan yang terlepas dari segala macam dorongan, rangsangan, emosi, intimidasi dan lain sebagainya.³⁷ Dengan demikian, Kant melihat bahwa kebebasan adalah kemampuan manusia dalam mengartikulasikan dirinya dalam bentuk segala aktifitas perbuatannya melalui tindakan yang bermoral.

Sehingga menurut Immanuel Kant, pada dasarnya moralitas dapat mengantarkan seseorang untuk menuju Tuhan, dan hal ini dapat dilihat pada dua ajaran Kant³⁸ tentang keutamaan yaitu, *pertama*; Tuhan dan suara hati. Bagi Kant, kesadaran moral diawali dengan kewajiban yang bersifat mutlak. Kewajiban seperti ini hanya dapat dibebankan kepada manusia

³⁵ Frans Magniz – Suseno, *13 Tokoh Etika, Ibid*

³⁶ Postulat adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara teoritis, akan tetapi dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa, karena suatu realitas tidak mungkin postulat itu benar-benar ada. Sehingga bagi Kant, Moralitas itu akan berimplikasi pada dua postulat, yaitu immoralitas jiwa dan eksistensi Tuhan. Atau dengan lain ungkapan, kenyataan moralitas hanya mungkin, apabila diibaratkan bahwa jiwa manusia tidak mati dan apabila Tuhan benar-benar ada. Lihat Frans Magniz – Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 153-154

³⁷ Frans Magniz – Suseno, *13 Tokoh Etika*, h. 153

³⁸ Penjelasan tentang postulat untuk lebih jelas lihat Simon Petrus L. Tjanjadi, *Petualangan Intelektual*, h. 294-295

oleh seorang pribadi lain yang juga bersifat mutlak. Pribadi tersebut tentunya bukanlah manusia, sebab manusia adalah makhluk terbatas. Dengan demikian, kesadaran moral dalam suara hati mengandaikan adanya seorang pribadi yang perintahnya wajib ditaati. Pribadi tersebut menurut Kant, adalah Tuhan. Dengan bertindak secara moral dan mengikuti suara hati-nuraninya, berarti manusia mengakui akan adanya kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Kesadaran akan kehadiran Tuhan, berada di luar jangkauan pemikiran dan nalar teoritis. Dalam suara hatinya, manusia menyadari tuntunan Tuhan yang memberi dan menjamin hukum yang abadi. Dengan demikian, bagi Kant suara hati-nurani adalah kesadaran akan suatu otoritas yang secara mutlak mengikat manusia kepada kewajibannya.

Kedua; Tuhan dan tujuan moralitas. Bagi Kant, kesadaran moralitas mewajibkan kita untuk mengusahakan "kebaikan tertinggi" (*summum bonum*) atau kebahagiaan sempurna. Namun kebaikan tertinggi atau kebahagiaan hakiki tersebut tidak pernah terealisasi sepenuhnya di dunia karena terhalang oleh berbagai problem keduniaan, yaitu berupa kejahatan dan sebagainya. Oleh karena itu, kebaikan moral manusia dapat membentuk hubungan dengan kebahagiaan sempurna apabila kita dapat menerima asumsi tentang adanya kebebasan berkehendak, keabadian jiwa dan Tuhan. Tidak mungkin suatu kewajiban moral tanpa disertai dengan kebebasan berkehendak. Hukum moral adalah hukum, dimana kita bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakini sendiri (otonom) sebagai sebuah kebenaran. Keabadian jiwa mengimplikasikan bahwa manusia sebagai pelaku tindakan moral dapat mencapai "kebaikan tertinggi" atau kebahagiaan sempurna yang tidak mungkin dicapai di dunia dan Tuhan adalah pribadi dan sekaligus sosok yang menjamin bahwa

manusia yang bertindak baik demi kewajiban moral akan memperoleh kebahagiaan sempurna tersebut. Dengan lain ungkapan, kebahagiaan sesungguhnya disediakan Tuhan bagi mereka yang hidupnya baik secara moral. Oleh karena itu, jika Tuhan ditolak eksistensinya, maka moralitas tidak lagi bermakna, karena nasib manusia yang hidupnya baik secara moral akan mengalami nasib yang relatif sama dengan orang yang berbuat kejahatan.

Dengan demikian, kebebasan memiliki korelasi positif dengan otonomi. Sehingga Kant kemudian membedakan antara sikap moral yang otonom³⁹ dan moral yang heteronomi.⁴⁰

³⁹Otonomi moral berarti manusia menaati kewajibannya, karena ia sendiri memiliki sebuah kesadaran. Karena itu, dalam memenuhi kewajibannya ia sebenarnya taat pada dirinya sendiri. Otonomi moral tidak berarti bahwa kita menolak untuk menerima hukum yang dipasang orang lain, akan tetapi ketaatan kalau memang dituntut untuk dilaksanakan karena keinsafan sendiri. Kita hidup dalam masyarakat bersama dengan komunitas lain, maka kemampuan untuk menyadari bahwa kehidupan bersama memerlukan tatanan dan kita pun harus menyesuaikan diri dengannya, akan tetapi itulah sesungguhnya hakikat demokrasi. Kita pun berhak untuk menyumbangkan sesuatu agar tatanan itu menjadi lebih baik adalah merupakan tanda kepribadian yang dewasa. Oleh karena itu, otonomi moral menuntut juga kerendahan hati untuk menerima bahwa kita juga adalah menjadi bagian dari masyarakat dan bersedia untuk hidup sesuai dengan aturan-aturannya. Lihat Frans Magniz - Suseno, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 44-45

⁴⁰Heteronomi moral adalah sikap dimana seseorang memenuhi kewajiban bukan karena ia insaf bahwa kewajiban itu pantas dipenuhi, melainkan karena ia tertekan, takut berdosa, takut dikutuk Tuhan dan berbagai ketakutan lainnya yang menghantui dirinya. Heteronomi dapat terjadi dalam hubungannya dengan orang tua, dalam sikapnya terhadap seksualitas, dan dalam ketaatannya terhadap tuntutan ajaran agama. Dengan demikian, moralitas heteronomi, yaitu orang yang menaati peraturan, akan tetapi tanpa melihat nilai atau maknanya. Ia hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan moral di lingkungannya, bukan

Kesadaran moral heteronomi perlu didobrak. Dengan demikian, seseorang yang berhasil membebaskan dirinya dari moral heteronomi merasa bagaikan orang yang selama hidupnya terkurung dalam kamar sempit yang tidak ada jendelanya, dan kemudian ke luar menghirup udara bebas dan segar lagi cerah di pagi hari yang menjanjikan sejuta harapan. Ia menjadi manusia yang baru dan merdeka. Sedangkan sikap moral otonom jauh dari merendahkan manusia karena membuka ruang kebebasan yang seluas-luasnya. Manusia dengan eksistensinya dapat menentukan tindakannya sendiri dan sekaligus memilih apa yang menjadikannya baik sebagai manusia. Karena manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Tuhan di bumi, akan dimintai pertanggungjawaban moral sebagai bentuk konsekuensi logis dari perjanjian primordialnya dengan Tuhan ketika hendak menciptakannya.

Kebebasan adalah tanda dan ungkapan martabat kemanusiaan yang dimiliki. Sebagai makhluk yang otonom, merdeka dan bebas, karena itu manusia seharusnya dapat menentukan pilihannya sendiri sekaligus dapat menentukan sikap dan tindakannya yang terbaik menurut dirinya sendiri. Jadi kebebasan adalah mahkota dari martabat sebagai manusia, dan hanya kebebasan yang bertanggung jawablah yang dapat menyatakan dirinya sebagai moralitas yang otonom. Moralitas adalah sikap dari hati seseorang yang terungkap dalam

karena kesadaran, melainkan karena takut ditegur dan takut berdosa sehingga dalam melakukan segala aktifitas kehidupannya tidak berani mengambil sikap sendiri. Jadi heteronomi ini merendahkan manusia, membuatnya menjadi takut, tidak bebas, tertekan, buta terhadap nilai-nilai dan tanggung jawab yang sebenarnya. Heteronomi moral adalah penyimpangan dari sikap moral yang sebenarnya. Frans Magniz - Suseno, *Etika Dasar*, h. 44-45.

tindakannya secara lahiriah, karena tindakannya merupakan ungkapan dari sikap dan ungkapan hati yang sesungguhnya.

C. Penutup

Sesungguhnya suara hati adalah sebuah kesadaran moral seseorang dan itu dapat dirasakan dalam diri setiap manusia, namun terkadang suara hati yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran kadang tenggelam dan bahkan terlupakan. Sehingga setiap manusia dalam hatinya telah terkungkung oleh nafsunya sendiri. Manusia memiliki suatu kesadaran tentang apa yang semestinya menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sendiri. Dengan demikian secara moral, sesungguhnya seseorang harus mampu menentukan sendiri apa yang harus dan akan dilakukannya dan tidak dapat melemparkan atau melepaskan tanggung jawab itu kepada orang lain. Suara hati membuat seseorang sadar bahwa kita selalu berhak untuk menentukan dan mengambil setiap sikap dan tindakan kita sendiri dan kewajiban untuk selalu taat terhadap berbagai otoritas dalam kehidupan masyarakat selalu terbatas dan karena itu, perintah untuk melawan suara hati nurani dari mana pun datangnya wajib ditolak karena bertentangan dengan moral sebab suara hati nurani adalah suara Tuhan. Manusia adalah satu-satunya yang harus memutuskan, menentukan dan sekaligus merumuskan hukum-hukum dan dalam konteks tersebut. Tidak sedikit manusia melampaui Kemahakuasaan dan Kedaulatan Tuhan.

Dengan demikian, kebaikan moral harus mengandung suatu tujuan berupa kebaikan tanpa syarat dan tanpa kualifikasi. Tujuan manusia sebagai makhluk individu adalah untuk mencapai kebahagiaan, dan kebahagiaan yang paling utama dan

hakiki harus ditemukan, yaitu kehidupan yang akan datang-kehidupan yang menjadi impian semua manusia. Dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui amal kebaikan yang bersifat lahiriah dan itu dilakukannya selama ia hidup di dunia, yaitu berupa ketaatan dan ketundukan kepada aturan-aturan dan tingkah laku atau moralitas serta upaya batiniah untuk meraih keutamaan jiwa dan itulah jalan menuju Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Antara Al-Gazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 2002
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996
- Hazlitt, Henry, *Dasar-dasar Moralitas*, (terj.), cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Kant, Immanuel, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, (terj.), cet. ke-1, Jogjakarta: Insigh Reference, 2004
- Poole, Rosa, *Moralitas dan Modernita* (terj.), cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1999
- Suseno, Franz Magnis, *13 Tokoh Etika*, cet. ke-7, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- _____, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, cet. ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 1987
- Tjahjadi, Simon Petrus L., *Petualangan Intelektual*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 2004

